

BAB II

KONFLIK SURIAH DAN PANDANGAN PEMERINTAH SURIAH TERHADAP PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT

2.1 Konflik Suriah

Pada bulan Maret 2011, Presiden Assad menghadapi tantangan besar terhadap pemerintahannya ketika protes anti pemerintah meletus di Suriah, yang di inisiasi oleh gelombang pemberontakan pro demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa *Arab Spring*. Pemerintah Suriah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Liga Arab (organisasi negara-negara Arab di Afrika Utara dan Timur Tengah) dan yang didukung oleh PBB. Pada bulan Agustus, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain menyerukan agar Presiden Assad mundur. Suriah diskors dari liga pada bulan November (Loft et al., 2023). Pada tahun 2012, pertempuran meluas dan menyebar ke ibu kota Damaskus dan Aleppo (Blanchard, 2023).

Konflik Suriah menjadi semakin kompleks karena yang terlibat didalamnya bukan hanya rezim pemerintah dan kelompok-kelompok yang melawan rezim saja tetapi muncul pihak – pihak eksternal yaitu negara-negara yang berperan sebagai aktor yang cukup berpengaruh dalam tingkat global maupun regional yang ikut memantau konflik yang terjadi di Suriah. Amerika Serikat terlibat sebagai pelopor bagi blok barat yang mencakup Turki, Arab Saudi dan Qatar. Sementara Rusia hadir sebagai pelopor blok timur yang mencakup negara-negara di Asia dan Timur Tengah seperti Cina, Iran, Irak, dan Lebanon. Kedua blok dan masing-masing negara nya memiliki kepentingan masing-masing sehingga mereka memanfaatkan situasi konflik Suriah untuk bisa meraih apa yang mereka jadikan sebagai incaran dari Suriah, seperti Amerika Serikat yang memang memiliki ketertarikan pada minyak dan gas alam (Kiran, 2013). Pemerintahan Bashar Al-Assad mendapat

bantuan dari China dan Rusia, sebagai anggota permanen dalam United Nations Security Council untuk menolak kiriman bantuan sebagai bagian dari upaya implemementasi prinsip R2P di Suriah.

Iran meningkatkan dukungan kepada Assad, menyediakan penasihat militer dan membantu mendirikan milisi pro-pemerintah, seperti Pasukan Pertahanan Nasional. Pada tahun 2012, jumlah pengungsi Suriah yang mengungsi akibat konflik mencapai 500.000 jiwa. Pada bulan Maret 2013, jumlahnya mencapai satu juta jiwa, dan pada bulan September 2013, jumlah nya mencapai dua juta jiwa. Pada bulan Agustus 2014, angkatan udara Amerika Serikat, untuk pertama kali nya melakukan intervensi militer di Suriah, hal ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye koalisi melawan ISIS di Irak dan Suriah. Selain muncul nya keterlibatan Amerika Serikat dalam dinamika konflik Suriah, Tiongkok dan Rusia juga ikut memberikan respon terhadap apa yang terjadi di Suriah. Namun respon yang diberikan oleh Tiongkok dan Rusia bukan bermaksud untuk membantu meringankan kondisi konflik di Suriah, melainkan Tiongkok dan Rusia memberikan suara veto nya untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk merujuk Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional guna meminta pertanggungjawaban Presiden Assad atas apa yang telah terjadi di negara nya (Loft et al., 2023).

Pada tahun 2014, Pemerintah Inggris juga ikut terlibat dalam dinamika konflik di Suriah dengan meluncurkan program *Syrian Vulnerable Person Resettlement Programme* untuk mengizinkan warga Suriah tertentu datang ke Inggris. Pada tahun 2015, Pemerintah mengatakan akan memukimkan kembali hingga 20.000 orang di bawah program tersebut. Di tahun 2015, Rusia, yang memang telah memberikan senjata dan dukungan diplomatik kepada Presiden Assad, kemudian meluncurkan kampanye militernya di Suriah. Kampanye ini dilakukan dengan mengerahkan pasukan militer angkatan darat Rusia dan serangan udara terhadap Tentara Pembebasan Suriah (yang menentang Assad). Intervensi yang

dilakukan oleh Rusia ini menjadi bentuk nyata keterlibatan Rusia untuk membantu memperkuat dan menguntungkan Presiden Assad dalam situasi konflik di Suriah. Pada tahun 2016, Pemerintah Suriah berhasil merebut kembali wilayah Aleppo yang sebelumnya telah dikuasai pasukan pemberontak sejak tahun 2012 (Blanchard, 2023). Tahun 2018, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukan militernya dan menyatakan bahwa ISIS telah berhasil dikalahkan (Loft et al., 2023).

Pembicaraan mengenai gencatan senjata telah dimulai sejak tahun 2019, diawali dengan adanya pertemuan komite konstitusi Suriah yang akan menyusun konstitusi baru bagi Suriah berdasarkan Resolusi PBB 2254 yang telah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, yang berisi sebuah *road map* untuk membantu proses perdamaian di Suriah (*a road map for a peace process in Syria*) (UNSC Resolution 2254, 2015). Melalui resolusi tersebut Dewan Keamanan PBB memberikan pandangan yang komprehensif tentang berbagai isu yang harus ditangani agar konflik di Suriah dapat berakhir dan menghadirkan stabilitas serta situasi yang damai. Resolusi PBB 2254 memberikan penegasan komitmen terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan dan integritas teritorial Suriah, serta menyediakan *road map* proses politik yang benar-benar dimiliki oleh Suriah yang nanti dalam prosesnya juga akan difasilitasi oleh PBB. Dalam resolusi tersebut juga menuntut adanya kepatuhan terhadap hukum internasional, menekankan perlindungan kepada warga sipil, gencatan senjata nasional, penanganan terorisme, penerapan proses pemulangan para pengungsi dengan aman dan pembebasan warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang. (<https://specialenvoysyria.unmissions.org/mandate>). Perundingan untuk mencapai gencatan senjata dan upaya perdamaian di Suriah terus dilakukan, namun di tahun 2021 Presiden Assad kembali memenangkan pemilihan presiden, sehingga muncul pemberontakan di daerah Daraa, yang akhirnya menyebabkan situasi di Suriah kembali memanas dengan banyaknya intervensi-intervensi serangan yang masuk. Protes terhadap

Presiden Assad semakin memuncak hingga tahun 2023 dikarenakan kondisi ekonomi di Suriah yang semakin memburuk(Blanchard, 2023).

Selama kurang lebih 10 tahun konflik berlangsung, Pemerintah Suriah dan kelompok bersenjata telah melakukan serangan terhadap warga sipil dan segala infrastruktur yang ada dengan sewenang-wenang tanpa memperdulikan hukum yang berlaku baik domestik maupun internasional. Seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dalam adanya konflik di Suriah telah melakukan tindakan yang dikategorikan dalam bentuk tindak kejahatan perang dan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (globalr2p.org, 2021). Kondisi Suriah yang memprihatinkan mengharuskan adanya bantuan dari komunitas internasional. Bantuan yang disalurkan harapan nya dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Suriah baik yang berada pada pengungsian di Suriah maupun yang mengungsi di negara-negara tetangga. Banyak nya tindakan yang mencederai hak asasi manusia para warga di Suriah, maka pemulihan terhadap pemenuhan hak asasi manusia di rasa cukup penting untuk diupayakan komunitas internasional, mengingat bahwa pemerintah negara Suriah tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi rakyat nya, alih-alih memberikan, justru pemerintah Suriah lah yang melakukan pelanggaran HAM tersebut dan menjadikan tindakan tersebut sebagai senjata perang.

2.2 Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah

Pemerintah Suriah telah dikendalikan oleh keluarga Al-Assad sejak tahun 1970. Pemerintah Suriah menyebut dirinya sebagai “Republik Arab Suriah”, meskipun fakta nya Suriah belum pernah menjadi negara demokrasi yang ditandai dengan belum dilaksanakannya pemilihan umum dengan prinsip yang bebas dan adil. Dalam proses

berjalan nya pemerintahan, Suriah merupakan negara diktator yang sebagian kekuasaan nya berasal dari militer. Selama Bashar Al-Assad memimpin, seringkali anggota keluarga juga menduduki jabatan tinggi di pemerintahan dan militer. Selain karena adanya dukungan keluarga dalam pemerintahan dan militer, kekuatan rezim Bashar Al-Assad juga didapat dari dukungan kelompok etnis yaitu kaum Alawi, kaum dari keluarga yang berkuasa. Faktor penting lain yang menguatkan rezim Bashar Al-Assad adalah adanya dukungan dari pihak asing terutama Rusia dan Iran, adapun dukungan yang di dapat oleh Bashar Al-Assad adalah dukungan finansial, militer, dan dukungan politik. (<https://guides.library.illinois.edu/Syria/Assad>).

Selama menjabat menjadi presiden, Bashar Al-Assad melindungi kekuasaan nya dengan memperluas jaringan dalam pengamanan politik yang sangat kuat. Bashar Al-Assad mengintegrasikan kekuatan militer ke dalam rezim yang dirinya pimpin, sehingga kondisi ini membuat pihak militer, aparat dan para pemangku kepentingan politik menjadi sangat lekat dan sulit dipisahkan dari rezim Bashar Al-Assad. Dalam masanya menjadi pimpinan di Suriah, Bashar Al-Assad menganut system politik satu partai, yang didominasi oleh militer dari kaum Alawi. Dalam pemerintahan Suriah terdapat institusi kabinet, parlemen dan satu partai besar yaitu Partai Ba'ath. Partai Ba'ath merupakan partai yang nasionalistik, populistik, sekularistik dan revolusioner. Partai tersebut juga memberikan pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, tidak ada pembagian kelas dan juga tidak ada pembagian kelompok-kelompok agama berbeda, sehingga banyak kelompok minoritas yang membutuhkan pengakuan politik akhirnya bergabung dengan Partai Ba'ath (Muhammad, 2016).

Dengan adanya dukungan yang kuat dari anggota militer, Partai Ba'ath, dan kelompok kaum Alawi, Bashar Al-Assad pun menjadi semakin yakin dalam memimpin dan merancang serangkaian pembaharuan bagi Suriah, antara lain, Bashar Al-Assad

memiliki ambisi untuk melakukan kampanye anti-korupsi, melakukan modernisasi terhadap aparaturnya, penggunaan teknologi modern, melakukan reformasi ekonomi dan menjalankan demokrasi yang sesuai dengan keadaan di Suriah. Bashar Al-Assad juga memberlakukan pelaksanaan wajib militer yang harus diikuti selama dua setengah tahun bagi para pelajar laki-laki berusia 18 tahun, melakukan reformasi politik dengan membebaskan tokoh – tokoh penting yang pada rezim sebelumnya ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap membahayakan eksistensi pemerintahan Suriah, namun dimasa kepemimpinan Bashar Al-Assad, tokoh-tokoh tersebut justru dibebaskan. Dimasa pemerintahan Bashar Al-Assad, kebebasan berpendapat yang sebelumnya telah dirampas oleh pemerintahan terdahulu sejak tahun 1958, akhirnya secara bertahap dipulihkan.

Saat peristiwa *Arab Spring* muncul dan berdampak bagi negara-negara di timur tengah, pemerintahan Suriah pun terguncang karena peristiwa *arab spring*, dan peristiwa ini membawa sebuah pandangan baru bagi masyarakat sipil Suriah terkait kinerja dan kepemimpinan Bashar Al-Assad saat itu, sehingga kejadian akan peristiwa *arab spring* ini menjadi sebuah momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Kemunculan pergolakan terhadap kondisi politik yang tergolong begitu ekstrim mendorong Bashar Al-Assad memutuskan untuk menjalankan tindakan yang cukup keras untuk meresponi para warga sipil yang melakukan demonstrasi. Dari peristiwa itulah protes dan konflik antara warga sipil dan pihak pemerintah bermula dan menjadi semakin besar karena adanya keterlibatan pasukan militer yang berada dibawah kepemimpinan Bashar Al-Assad (Aisyah et al., 2021).

2.3 Politik Luar Negeri Suriah dalam Kepemimpinan Bashar Al-Assad

Politik luar negeri sebuah negara sering kali mencerminkan tujuan dan kepentingan strategis pemimpin yang berkuasa. Dalam kepemimpinan Bashar al-Assad, presiden Suriah yang menjabat sejak tahun 2000, politik luar negeri Suriah banyak menggambarkan

upaya untuk mempertahankan kekuasaan, membangun aliansi strategis, dan menghadapi tantangan internasional.

Bashar Al-Assad memulai masa kepresidenannya di tengah-tengah masa reformasi dan modernisasi. Namun, ketika konflik Suriah pecah pada 2011, prioritas politik luar negeri Bashar Al-Assad berubah menjadi mempertahankan kekuasaan dan stabilitas dalam negeri. Dalam konteks ini, Bashar Al-Assad mengadopsi strategi politik luar negeri yang berfokus pada beberapa aspek utama yaitu:

- **Menjaga Kedaulatan Nasional:** Salah satu aspek utama dari politik luar negeri Bashar Al-Assad adalah penekanan pada kedaulatan nasional dan penolakan terhadap intervensi asing. Assad menilai bahwa konflik Suriah adalah masalah internal yang tidak memerlukan campur tangan internasional. Penolakannya terhadap prinsip Responsibility to Protect (R2P) adalah contoh dari sikap ini, di mana ia melihat R2P sebagai alat untuk campur tangan asing yang dapat merusak kedaulatan Suriah (Davenport, 2012).
- **Memperkuat Aliansi dengan Rusia dan Iran:** Untuk memperkuat posisinya, Assad telah membangun aliansi strategis dengan Rusia dan Iran. Dukungan Rusia dalam bentuk intervensi militer yang dimulai pada 2015 telah membantu Assad mengubah arah konflik, memperkuat posisi pemerintahannya di Suriah. Rusia juga berperan dalam proses diplomatik melalui inisiatif pelaksanaan perundingan Astana (Allison, 2013). Iran, sebagai sekutu lama, memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dan pelatihan militer. (Cafarella & Harrington, 2017).

Dukungan Rusia kepada Assad mencerminkan kepentingan strategis Moskow di Timur Tengah. Rusia melihat Suriah sebagai mitra strategis dan pelabuhan militer di Mediterania. Intervensi militer Rusia di Suriah tidak hanya membantu Assad untuk mempertahankan kekuasaan tetapi juga memperkuat posisi Rusia sebagai kekuatan

global di kawasan Timur Tengah (Lukin, 2015). Rusia juga memanfaatkan konflik Suriah untuk menguji strategi militer baru dan untuk meraih keuntungan geopolitik, termasuk pengaruh dalam negosiasi internasional mengenai solusi politik untuk Suriah.

Selain Rusia, Iran yang telah menjadi sekutu utama Assad sejak lama, memberikan dukungan yang mencakup bantuan finansial, militer, dan dukungan terhadap milisi-milisi pro-Iran yang beroperasi di Suriah. Keberadaan milisi ini juga berkaitan dengan strategi Iran untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan untuk menyeimbangkan kekuatan regional, terutama dalam menghadapi Israel dan negara-negara Arab Sunni (Katzman, 2018).

2.4 Dampak Politik Luar Negeri Suriah terhadap Konflik Suriah dan Stabilitas Kawasan

Politik luar negeri Assad memiliki dampak signifikan terhadap dinamika konflik Suriah dan stabilitas kawasan Timur Tengah:

- **Konflik Suriah:** Dukungan internasional dari Rusia dan Iran telah memperkuat posisi Assad di medan perang, memungkinkan pemerintahannya untuk melakukan perebutan Kembali terhadap sebagian besar dari wilayah yang sebelumnya diduduki atau dikuasai oleh oposisi. Namun, konflik masih berlanjut di beberapa area, dengan berbagai aktor internasional yang terlibat, termasuk kelompok-kelompok oposisi dan kekuatan asing lainnya seperti Turki (Hassan, 2019). Hal ini menciptakan situasi yang rumit dan tidak stabil, dengan dampak langsung terhadap warga sipil dan kondisi kemanusiaan di Suriah.
- **Stabilitas Kawasan:** Kehadiran Iran di Suriah dan intervensi Rusia telah menambah ketegangan dengan negara-negara tetangga seperti Turki dan Israel. Turki telah terlibat dalam operasi militer di Suriah untuk menanggapi ancaman dari kelompok Kurdi yang dianggap sebagai teroris. Sementara itu, Israel melakukan serangan udara terhadap

target-target yang terkait dengan Iran, dan dengan kondisi yang demikian ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat. (Hirsch, 2020).